

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.
- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian Skripsi Tesis dan Karya Ilmiah Lainnya*, Yogyakarta, Liberty, 1998.
- Harahap, M. Yahya, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding, Cetakan Tiga*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- Haris, Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta, Salemba Humanika, 2010.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2012.
- Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Revisi Edisi 2010, Jakarta, Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan Kesatu*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Manullang, M. Fernando, *Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai)*, Jakarta, Buku Kompas, 2007.
- Sanusi, Muhammad, *Penguatan Kinerja Unit Balai Harta Peninggalan*, Jakarta, Balitbangkumham Press, 2018.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta, Liberty, 1986.

Soimin, Sudaryo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 2003.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.

Sumardjono, Maria S.W, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2014.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016

Tim Balai Harta Peninggalan Semarang, *Buku Saku Balai Harta Peninggalan Semarang*, Semarang, Kemenkumham RI Kanwil Jawa Tengah, 2024.

Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Surabaya, Prestasi Pustaka, 2006.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 100).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6335).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339).

Kompilasi Hukum Islam

Nota Kesepahaman Bersama Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tentang Peningkatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dan Bidang Peradilan Nomor: W13.HH.05.05-36 atau Nomor: W12-1/2574/HM.01.1/IX/2022.

## **Jurnal**

Aisyah, Nur, Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 5, No. 1, (Juni, 2018): 73-92, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665>

Hambali, A. Nurhidayah., dan Subehan Khalik, “Eksistensi Balai Harta Peninggalan Dalam Penanganan Kasus Kewarisan Anak”, *Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, (Oktober, 2019): 31-41, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10938>

Hidayah, Fransisca Ismi, “Diskursus Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 65, 2014, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/316>

- Natasha, Shela, “Rekonstruksi Eksistensi Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Melalui Harmonisasi Peraturan Hukum Tentang Perwalian”, *Majalah Hukum Nasional*, 49(2). 2019, <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.34>
- Saleh, Tasya Aisha Putri, “Prinsip Kehati-hatian dalam Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Sedang Dalam Sengketa pada Program PTSL”, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, (September, 2023): 3560-3571, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Savira, Elita, “Penetapan Perwalian Anak Yang Diminta PPAT Sebagai Syarat Pembuatan Akata Jual Beli Hak Atas Tanah”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, (2017): 3560-3571, <https://media.neliti.com/media/publications/119942-ID-none.pdf>
- Suhariyanto, Budi, “Quo Vadis: Status Jabatan Dan Sistem Karir Kepaniteraan Peradilan”, *Jurnal Hukum Peradilan*, Vol. 3, No. 1, (Maret, 2014): 11-24, <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.3.1.2014.11-24>
- Tafonao, Ingat Riang, “Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan Kota Medan Selaku Wali Pengawas”, *Jurnal Profil Hukum*, 1(2). 2023, <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JPH/article/view/3153>

### **Skripsi/Tesis**

- Akmal, Khairul., “Pelaksanaan Tugas Panitera Dalam Pemberian Akta Cerai Di Pengadilan Agama Bangkinang”. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau. 2011.
- Lestari, Dian Intan., “Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Jepara”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Unissula, 2021.
- Sa’roni, “Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Harta Pailit Setelah Berlakunya UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2006
- Sadtyafitri, Murti., “Tinjauan Hukum Pemberian Izin Atas Tanah Yang Merupakan Harta Warisan Dengan Adanya Anak Belum Dewasa”. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2023.

Siringoringo, Erwin Geo Vanny P, “Urgensi Persetujuan Izin Jual Dari Balai Harta Peninggalan Terhadap Harta Anak Di Bawah Perwalian”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2024.

Syuhada. “Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yang Tidak Diketahui Pemilik Dan Ahli Warisnya (Studi di Balai Harta Peninggalan Medan). *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2009.

WHP, Gilang Ayu Zahara., “Permohonan Penetapan Perwalian Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Untuk Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PA.Btl). *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2023.

### Internet

Astanto, Heri Widi. “Pembaharuan Penunjukan Wali/Perwalian Anak setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019”,  
<https://pa-cibadak.go.id/new/berita-seputar-peradilan/287-pembaharuan-penunjukan-wali-perwalian-anak-setelah-berlakunya-peraturan-pemerintah-no-29-tahun-2019> , (Diakses pada tanggal 17 Mei 2024).

BHP Medan – Kanwil Kemenkumham RI Sumatera Utara, “*Lakukan Monitoring Pengampuan, BHP Medan Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Toba*”,  
<https://sippn.menpan.go.id/berita/49630/balai-harta-peninggalan-medan/lakukan-monitoring-pengampuan-bhp-medan-berkoordinasi-dengan-kantor-pertanahan-kabupaten-toba> , (diakses 18 November 2024).

Kanwil Jogja. “Kemenkumham DIY Dukung Kerja Sama Bidang Peradilan Kanwil Jateng dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta”,  
<https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kemenkumham-diy-dukung-kerja-sama-bidang-peradilan-kanwil-jateng-dan-pengadilan-tinggi-agama-yogyakarta> ,(Diakses pada tanggal 7 Mei 2024).

Kurnia, Abi Jam'an S.H. “Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan”,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-dan-fungsi-balai-harta-peninggalan-lt5ca4c04f2ca1e/> , (Diakses pada tanggal 16 Mei 2024).

Pengadilan Agama Bantul. “Laporan Perkara PA Bantul Tahun 2023”,

[https://www.instagram.com/pa\\_bantul/p/C1szRORP7Qm/?img\\_index=1](https://www.instagram.com/pa_bantul/p/C1szRORP7Qm/?img_index=1) , (diakses pada 17 Mei 2024).

Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023”, <https://www.pa-yogyakarta.go.id/storage/files/shares/Kesekretariatan/Laporan%20Tahunan/Laptah%202023.pdf> , (diakses pada 17 Mei 2024).

Pengadilan Agama Sleman. “Laporan Perkara Pengadilan Agama Sleman Tahun 2023”, <https://www.pa-slemankab.go.id/storage/files/shares/Laporan-laporan/2024/Laporan%20Pelaksanaan%20Kegiatan%202023.pdf>, (diakses 17 Mei 2024).

Pengadilan Agama Wates. “Laporan Perkara Pengadilan Agama Wates Tahun 2023”, <https://drive.google.com/file/d/1dgna1RL8AZxtsQpKF4wCf1FgdnBao7Fl/view> , (diakses pada 17 Mei 2024).

Pengadilan Agama Wonosari. “Laporan Perkara Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2023”, <https://drive.google.com/file/d/1qi4-Yu9-d9sE8-dLcZnxkcdGOIvuVyHm/view> , (diakses pada 17 Mei 2024).

Saefudin. “Perwalian Anak Oleh Orang Tua Kandungnya Dalam Perspektif Teori dan Praktek di Pengadilan Agama”, <https://www.pa-yogyakarta.go.id/article/Perwalian-Anak-Oleh-Orang-Tua-Kandungnya> , (diakses 11 Agustus 2024).